



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah harus ditetapkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana kerja Pemerintah Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 tahun 2019);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 tahun 2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

13. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 316);
14. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 574);
15. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 723);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kota Kupang Tahun 2025 No.4, Tambahan Daerah Kota Kupang Nomor 315);
17. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 719);
18. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2026, (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 727).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah 1 (satu) tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan.
- (2) Renja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
  - d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Penutup.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

#### Pasal 4

Format daftar isian dan uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 November 2025

WALI KOTA KUPANG,  
  
CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 20 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,  
  
JEFFERY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 729

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang/Pemrakarsa	